

## Analisis Ketimpangan Distribusi Manfaat Dalam Implementasi Resettlement Tol Getaci di Desa Ciluluk

**Najwa Nuraeni<sup>1</sup>, Ibrohim Wafa<sup>2</sup>, Nabiela Rizki Alifa<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [1218030139@student.uinsgd.ac.id](mailto:1218030139@student.uinsgd.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [1213010063@studnet.uinsgd.ac.id](mailto:1213010063@studnet.uinsgd.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [nabielerizki@uinsgd.ac.id](mailto:nabielerizki@uinsgd.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan distribusi manfaat dalam implementasi resettlement proyek Tol Getaci di Desa Ciluluk yang kemudian hasilnya akan dijadikan bahan advokasi. Latar belakang penelitian ini berfokus pada ketimpangan distribusi manfaat atas perbedaan harga tanah antara Desa Ciluluk dengan tanah adat di Desa Mekarlaksana, yang mana harga tanah di Desa Ciluluk ditawar dengan harga dibawah pasaran per meternya, sedangkan tanah di Desa Mekarlaksana ditawar dengan harga yang lebih tinggi per meternya sehingga. Selain itu, ketimpangan distribusi manfaat juga terjadi pada proses pencairan dana kompensasi di Desa Ciluluk yang lebih lambat sehingga masyarakat Desa Ciluluk merasa adanya ketidakadilan dalam distribusi manfaat dalam pembangunan Tol Getaci. Metode pengabdian yang digunakan dalam penelitian ini berupa sistem pemberdayaan masyarakat dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan rembug warga, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketimpangan distribusi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Ciluluk. Maka kesimpulannya ialah akibat dari ketidaktransparan dan ketidakseimbangan dalam proses resettlement dapat memperparah rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap adanya pembangunan proyek Tol Getaci. Implikasi dari hasil penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan harga tanah dan percepatan pencairan dana kompensasi. Selain itu diperlukannya tim mediasi independen dan program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Desa Ciluluk pasca-resettlement untuk mencegah ketidakadilan yang serupa dimasa mendatang.*

**Kata Kunci:** Advokasi, Desa Ciluluk, Ketimpangan Distribusi Manfaat, Masyarakat, Resettlement

### Abstract

*This study aims to analyze the disparity in benefit distribution in the implementation of the Tol Getaci resettlement project in Desa Ciluluk, with the results intended for advocacy purposes. The background of this research focuses on the inequality in benefit distribution due to differences in land prices between Desa Ciluluk and the customary land in Desa Mekarlaksana. Land in Desa Ciluluk was negotiated at below-market rates per square meter, while land in Desa Mekarlaksana was negotiated at higher rates per square*

*meter. Additionally, disparities in benefit distribution are evident in the slower disbursement of compensation funds in Desa Ciluluk, leading to perceptions of injustice among the community regarding the Tol Getaci project. The research employs a community empowerment approach, using data collection techniques such as community discussions and interviews. The findings indicate a perceived disparity in benefit distribution among the residents of Desa Ciluluk. The conclusion is that a lack of transparency and imbalance in the resettlement process exacerbates the community's dissatisfaction with the Tol Getaci project. The implications of this research underscore the importance of transparency in land pricing and the expeditious disbursement of compensation funds. Furthermore, there is a need for an independent mediation team and socioeconomic empowerment programs for the Desa Ciluluk community post-resettlement to prevent similar injustices in the future.*

**Keywords:** Advocacy, Ciluluk Village, Benefit Distribution Inequality, Community, Resettlement

## A. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur merupakan sebuah langkah krusial dalam proses modernisasi serta disertifikasi produksi, sehingga dapat memperkuat daya saing suatu negara di kancah internasional serta mengakomodasi laju urbanisasi yang semakin cepat (Santosa et al. 2023). Dibangunnya mega proyek pembangunan Tol Getaci (Gedebage, Tasik, dan Cilacap) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas jaringan infrastruktur jalur penghubung antar kota dan Desa di pulau Jawa, sehingga dapat meningkatkan koneksi dan mobilitas antar daerah serta meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sebelumnya terisolasi (Joga and Indrajoga 2023). Tetapi, meskipun pembangunan ini menawarkan banyak manfaat, proyek ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan menimbulkan beberapa dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung (Fakhrozi, Ningrum S, and Amanda 2020). Salah satu wilayah yang terdampak dari pembangunan jalan Tol Getaci ini ialah Desa Ciluluk. Desa Ciluluk merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung (Azali and Fauzia 2023).

Proses pembebasan lahan dan *resettlement* (pemindahan) merupakan aktivitas krusial dalam setiap pembangunan infrastruktur, tetapi proses ini mengundang ragam kontroversial diberbagai kalangan. Desa Ciluluk merupakan salah satu wilayah terdampak akibat pembebasan lahan oleh proyek Tol Getaci, sehingga sebagian masyarakat Desa harus direlokasi (Putri and Dewi 2023). Pelaksanaan pembebasan lahan sering kali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat yang terdampak dalam konteks *resettlement*. Ketimpangan distribusi manfaat dalam proyek pembangunan Tol Getaci mencerminkan adanya perbedaan signifikan dalam penerimaan manfaat dari proyek

tersebut oleh masyarakat (Kotalewala, Laturette, and Uktolseja 2020). Di Desa Ciluluk, selain dari masyarakat yang menerima pemindahan, dampak dari pembangunan Tol Getaci ini juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur truk pengangkut bebatuan. Pasalnya, masyarakat harus menghadapi polusi debu yang signifikan, jalan yang rusak akibat muatan truk, serta ketidakadilan dalam pemberian kompensasi yang dianggap tidak seimbang dengan dampak yang mereka alami. Fenomena ini menunjukkan bahwa manfaat dari proyek pembangunan infrastruktur tidak selalu merata oleh semua pihak yang terdampak, dan bahkan seringkali menjadi pemicu atas ketidakpuasan sosial bagi masyarakat (Diatmika and Rahayu 2022).

Urgensi dari penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami lebih dalam mengenai ketimpangan distribusi manfaat dapat terjadi dalam konteks *resettlement* dan pembangunan infrastruktur Tol Getaci bagi masyarakat di Desa Ciluluk. Kajian ini bersifat penting, karena ketimpangan ini bukan hanya masalah ekonomi, melainkan masalah keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Ciluluk yang terdampak (Ohoitimir and Jamlean 2023). Ketidakadilan distribusi manfaat dapat menimbulkan konflik sosial, penurunan kualitas hidup serta ketidakpuasan yang terus berlarut-larut, yang pada gilirannya dapat menjadi penghambat proses pembangunan jalan Tol Getaci itu sendiri (Pratiwi, Althafah, and Khatammi 2023).

Penelitian ini akan berfokus pada Desa Ciluluk sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi ketimpangan distribusi manfaat terjadi dalam implementasi *resettlement* terkait pembangunan jalan Tol Getaci. Subjek penelitian ini mencakup masyarakat yang terkena pemindahan dan masyarakat yang tidak terkena pemindahan tetapi terkena dampak lain dari proyek, seperti polusi dan kerusakan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan pihak berwenang dan pelaksana proyek untuk memahami kebijakan dan keputusan yang diambil dari proses distribusi manfaat berdasarkan perspektif para pemangku kepentingan mengenai keadilan distribusi.

Penelitian ini didasarkan pada teori *Distributional Justice* (Keadilan Distribusi) yang dikemukakan oleh Jhon Rawls (1971) mengenai pentingnya keadilan distribusi. Hal ini dapat dilihat dalam karyanya yang berjudul *A Theory of Justice* (Ramadhan 2017) bahwa distribusi manfaat serta beban dalam masyarakat harus dilakukan secara adil dan merata, terutama bagi mereka yang rentan terkena dampaknya. Karena konteks dari penelitian ini adalah sebuah *resettlement*, maka teori ini relevan untuk menganalisis tentang manfat dari adanya pembangunan infrastruktur, seperti aksebilitas dan keadilan sosial dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung (Amani and Najicha 2024). Selain itu, teori keadilan Rawls juga menjelaskan bahwa sebuah pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan tetap mempertimbangkan serta

melindungi hak-hak masyarakat yang termarginalisasi dalam keadilan sosial (Yuanita 2022). Dalam kasus pembangunan Tol Getaci, konsep keadilan sosial digunakan untuk menelaah aspek-aspek keadilan distribusi manfaat seperti kelayakan kompensasi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap dampak lingkungan (Puspita and Atmaja 2020).

Penelitian yang mengkaji isu distribusi manfaat dalam *resettlement* dan pembangunan infrastruktur sudah pernah dilakukan dalam penelitian terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Butarbutar and Rahayu 2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Dampak Sosial dan Ekonomi Pembangunan Jalan Tol MKTT Terhadap UMKM Pasar Bengkel Kabupaten Serdang Begadai". Hasil penelitian yang dilakukan Butartar dan Rahayu ialah adanya dampak dari dibangunnya jalan Tol MKTT terhadap keadaan sosial dan ekonomi para UMKM di Pasar Bengkel Kabupaten Serdang Begadai, karena para UMKM itu adalah kelompok yang termarginalisasi sehingga perlu perhatian khusus dalam mendapatkan keadilan sosial.

Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada analisis ketimpangan distribusi manfaat dalam implementasi *resettlement* Tol Getaci, dengan subjek masyarakat di Desa Ciluluk yang terdampak oleh adanya pembangunan proyek Tol Getaci. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian distribusi manfaat. Dan memberikan analisis kritis tentang peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang memiliki otoritas dalam memitigasi dampak ketimpangan distribusi manfaat.

Advokasi dalam penelitian bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara inklusif dan dibangun berdasarkan asas kesejahteraan bersama bagi masyarakat Desa Ciluluk . Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai ketimpangan distribusi manfaat terjadi dalam konteks *resettlement* di Desa Ciluluk, serta menawarkan beberapa rekomendasi saran yang merujuk pada keadilan distribusi manfaat dalam pembangunan infrastruktur.

## B. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sistem pemberdayaan masyarakat (Sisdamas). Sistem pemberdayaan masyarakat (Sisdamas) merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengabdian (Hayat, Sugianto, and Bunyamin 2021). Metode Sisdamas menekankan pada penetapan bahwa masyarakat bukan hanya sekadar objek penelitian melainkan sebagai subjek penelitian dalam proses perubahan sosial. Dalam pelaksanaan program, pendekatan ini melalui beberapa siklus yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dari pengabdian yang dilakukan.

Secara spesifik, pengabdian ini melewati beberapa tahapan penting yang dirancang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Desa Ciluluk. Salah satu langkah awal dalam metode ini adalah sosialisasi, yaitu penyampaian secara terbuka kepada masyarakat mengenai informasi penting terkait proyek serta dampaknya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai dampak positif dan negatif dari pembangunan Tol Getaci, serta menjelaskan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari adanya pembangunan Tol Getaci. Sosialisasi dilakukan secara informal, dengan cara membuka dialog terbuka terhadap pihak-pihak yang terkait. Hal ini merupakan cara yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang mungkin tidak terbiasa terlibat dalam sosialisasi formal, sehingga masyarakat dapat merasa nyaman tanpa adanya tekanan selama sosialisasi berlangsung. *Output* dari tahap ini ialah terkumpulnya aspirasi serta umpan balik dari masyarakat.

Tahapan selanjutnya yaitu berupa perumusan dan pemetaan masalah. Seluruh aspirasi yang ditampung akan kembali diolah dan dirumuskan sebagai sebuah laporan. Laporan aspirasi dan rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada pihak terkait yang memiliki otoritas dalam pembangunan Tol Getaci untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak hanya sebagai dokumentasi saja, tetapi menjadi bahan advokasi dalam mempengaruhi kebijakan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara inklusif dan dibangun berdasarkan atas kesejahteraan bersama bagi masyarakat Desa Ciluluk yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung (Santosa et al. 2023).

Hasil dari metode pengabdian berbasis sistem pemberdayaan masyarakat (Sisdamas) adalah tertampungnya aspirasi masyarakat, dengan begitu pihak terkait yang memiliki otoritas dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Seri Hartati, Amir Syamsuadi, and Luluk Elvitaria 2021). Selain itu, aspirasi yang terkumpul juga dapat menciptakan hubungan antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan, karena ketika aspirasinya didengar masyarakat akan merasa lebih diperhatikan, sementara para pemangku kepentingan juga dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan akan berlangsung secara komprehensif.

Seluruh aspek penelitian ini berasaskan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Temuan-temuan yang telah ditemukan sebelumnya digunakan untuk merancang intervensi yang tepat sasaran, sehingga proses ini menjadi sebuah umpan balik yang dinamis antara penelitian dengan pengabdian. Oleh karena itu, metode pengabdian ini diharapkan dapat berdampak jangka panjang yang berkelanjutan, sehingga masyarakat di Desa Ciluluk ini dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang secara mandiri disaat menghadapi situasi yang serupa.

## C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan pengabdian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Sisdamas) terkait proyek pembangunan Tol Getaci di Desa Ciluluk dilakukan bersamaan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dalam konteks ini, pengabdian dilakukan selama 35 hari sejak tanggal 29 Juli – 31 Agustus 2024. Dalam rentang waktu ini, program KKN dapat menjadi jalan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, melihat proses pembangunan secara nyata dan dapat menjadi jembatan antara masyarakat Desa Ciluluk dengan pihak terkait dalam pembangunan Tol Getaci.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, untuk memastikan bahwa aspirasi serta kepentingan masyarakat terdampak dapat terakomodasi secara optimal. Rincian pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai berikut:

### 1. Persiapan dan Sosialisasi Awal

Kegiatan persiapan dan sosialisasi awal ini memerlukan waktu tujuh hari dan dilakukan pada Minggu pertama, karena tim pengabdian perlu melakukan pertemuan awal dengan Kepala Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperkenalkan program serta tujuan pengabdian. Sosialisasi dan pembukaan program KKN dilakukan di Balai Desa secara formal. Sedangkan untuk sosialisasi secara informal dilakukan secara berkunjung ke rumah-rumah masyarakat dan berdialog ringan diselasar rumah untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selama sosialisasi, tim pengabdian menjelaskan rencana kegiatan dan mengumpulkan berbagai masukan dari masyarakat sebagai perencanaan tindak lanjut.

### 2. Penampungan Aspirasi

Kegiatan penampungan aspirasi dilakukan di Minggu kedua, tim mengadakan kegiatan rembug warga dengan menggunakan metode *Forum Group Discussions* (FGD) dengan berbagai kelompok masyarakat, seperti Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna, dan Masyarakat yang dilaksanakan di madrasah Al-Hidayah. Pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan, kekhawatiran, serta harapan masyarakat terkait masalah yang dihadapi oleh masing-masing kelompok masyarakat. Dalam kegiatan ini juga, tim melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang terkena dampak, baik yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara ini difokuskan pada pengalaman pribadi serta dampak sosial-ekonomi yang dirasakan sejak adanya pembangunan Tol Getaci. Estimasi waktu yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat ini dibutuhkan tujuh hari, karena aspirasi tidak hanya ditampung saat FGD saja, melainkan saat wawancara juga.

### 3. Pemetaan Sosial dan Masalah

Pemetaan sosial dan mengklasifikasi masalah berdasarkan urgensinya dilakukan pada Minggu ketiga dengan estimasi waktu selama tujuh hari, karena memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memetakan wilayah untuk mengetahui bentuk pemetaan sosialnya. Pemetaan sosial dilakukan guna

mengetahui wilayah mana saja yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung akibat dari proyek pembangunan Tol Getaci. Sedangkan untuk pemetaan masalah diklasifikasi berdasarkan keluhan langsung dari masyarakat, dan masalah dibagi menjadi dua yaitu masalah masyarakat yang terkena dampak secara langsung, serta masalah masyarakat yang terkena dampak tidak secara langsung. Pemetaan dilakukan di Desa Ciluluk RT 04/RW 10.

#### **4. Advokasi dan Penyusunan Rekomendasi**

Di Minggu keempat, tim mulai merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif berdasarkan data yang terkumpul selama sosialisasi dan FGD. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil yang diusulkan oleh masyarakat terkait keadilan sosial selama proses pembangunan Tol Getaci berlangsung dalam konteks *resettlement*. Rekomendasi disampaikan kepada para pemangku kepentingan yang memiliki otoritas atas pembangunan Tol Getaci. Penyampaian rekomendasi dilakukan untuk memastikan tersampaikannya aspirasi masyarakat Desa Ciluluk terkait keinginannya dalam mendapatkan keadilan distribusi manfaat dalam pembangunan Tol Getaci. Advokasi dilakukan secara informal, yaitu berdialog ringan namun bermutu agar hasil pengadvokasian dapat tersampaikan dengan jelas. Penyampaian rekomendasi disampaikan di dua tempat yaitu kantor Desa Ciluluk dan lokasi proyek. Estimasi waktu untuk mengadvokasi dan menyusun rekomendasi memerlukan waktu sepuluh hari, karena perlu menyesuaikan waktu para pemangku otoritas yang memiliki kesibukan masing-masing.

#### **5. Penutupan dan Refleksi**

Untuk penutupan dan refleksi dilakukan pada Minggu kelima, pada waktu ini tim mulai melakukan rekapitulasi atas seluruh proses analisis dan hasil utama pengabdian. Seluruh kegiatan yang dilakukan seperti wawancara, observasi lapangan, dan pengumpulan data direkapitulasi dengan *output* berbentuk artikel. Refleksi dari pengabdian ini terhadap masyarakat baik dari sisi pemahaman mereka tentang ketidakadilan distribusi manfaat yang dialami maupun potensi solusi yang diusulkan. Untuk melakukan kegiatan ini, tim hanya memerlukan waktu empat hari, karena tim dipecah berdasarkan tugasnya untuk meyelesaikan pekerjaan lebih efisien.

Pengabdian yang dilakukan hanya 35 hari tentu saja menghadapi beberapa kendala yang muncul seperti adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal, sehingga menyebabkan kebijakan *resettlement* lebih menguntungkan pihak berkuasa dan kelompok elit. Untuk solusi yang ditawarkan dalam pengabdian ini meliputi pendekatan berbasis partisipasi masyarakat yang lebih inklusif, seperti meminta trasparansi yang lebih baik dalam distribusi informasi dan kompensasi agar hak-hak masyarakat di Desa Ciluluk lebih terjamin.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini menemukan adanya ketimpangan distribusi manfaat yang signifikan oleh masyarakat di Desa Ciluluk dalam implementasi *resettlement* pembangunan proyek Tol Getaci, khususnya di Desa Ciluluk RT 04/RW 10. Masalah utama terletak pada perbedaan harga tanah yang ditawarkan kepada masyarakat Desa Ciluluk dengan tanah adat di Desa Mekarlaksana. Tanah adat ini tepat berada di sebrang Desa Ciluluk, sehingga masih berada di lingkup proyek yang sama. Dalam proses *resettlement* harga tawar tanah di Desa Ciluluk jauh dibawah harga pasaran untuk per meternya. Sedangkan untuk Desa Mekarlaksana, harga tawar tanah mencapai harga pasaran per meternya. Ketimpangan harga tawar tanah yang ditawarkan menimbulkan ketidakadilan dikalangan masyarakat Desa Ciluluk, karena tanah mereka dinilai lebih rendah, dan tidak sesuai dengan harga beli tanah sebelumnya. Selain itu, masyarakat Desa Ciluluk juga merasakan ketidakadilan dalam proses pencairan dana kompensasi. Dana kompensasi di Desa Mekarlaksana sudah kebih awal cair, sementara masyarakat Desa Ciluluk belum mendapatkan kepastian waktu untuk pencairan dana sejak awal pandemi Covid-19 hingga saat ini. Situasi seperti ini menjadikan frustasi dikalangan masyarakat Desa Ciluluk yang terkesan digantung tanpa adanya kejelasan yang padahal dokumentasi pendukung sudah selesai sejak lama. Masyarakat merasa resah terhadap digantungnya pencairan dana, karena proses membeli rumah baru tidak akan semudah itu sehingga perlu ada jarak waktu antara penggusuran rumah dengan pindah rumah.

Ketidakadilan kompensasi juga dirasakan oleh masyarakat Desa Ciluluk di RT 01/RW 03, karena pasalnya wilayah ini merupakan wilayah yang terletak di jalan utama menuju proyek pembangunan, sehingga masyarakat RW 03 merasakan dampak secara tidak langsung dari adanya pembangunan proyek Tol Getaci. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat ini ialah polusi udara dan rusaknya akses jalan umum akibat kendaraan truk pengangkut batu yang setiap hari melintasi jalan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat RT 01/RW 03 mendapatkan kompensasi setiap kepala rumah tangganya. Kompensasi yang didapatkan per KK (Kartu Keluarga) disetiap bulannya sangat tidak seimbang dengan dampak yang dirasakan. Oleh karena itu tim menyarankan uang kompensasi digunakan untuk uang kas RW, sehingga bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat dan menyeluruh.

## B. Penyelesaian Masalah

Masyarakat Desa Ciluluk pada awalnya mencoba melakukan penentangan terhadap tawaran harga yang dirasa terlalu rendah, tetapi melalui diskusi yang dilakukan bersama pihak-pihak terkait, mereka menyadari bahwa perlawanan mereka hanya akan semakin memperlambat proses pencairan dana kompensasi lebih jauh. Karena masyarakat Desa Ciluluk merasa tidak memiliki kekuatan dalam negosiasi yang cukup dalam memperjuangkan harga yang lebih adil, oleh karena itu masyarakat memutuskan untuk pasrah menerima keputusan harga yang ditawarkan meskipun merasa tidak puas hasilnya. Oleh karena itu, pangabdian merekomendasikan transparansi yang lebih baik dalam penetapan harga tanah, percepat pencairan dana

kompensasi yang tertunda, dan perlu membentuk tim mediasi independen untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan pengembang proyek. Selain itu, program pasca-*resettlement* juga diperlukan untuk membantu masyarakat bangkit dan mandiri secara sosial ekonomi setelah menjual tanah, seperti rekomendasi lokasi pemukiman dan program pemberdayaan ekonomi.

### **C. Indikator dan Alat Ukur Keberhasilan Penelitian**

#### 1. Kepastian Pencairan Dana Kompensasi

Indikator dan alat ukur utama keberhasilan dalam penelitian ini adalah pencairan dana kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak, khususnya masyarakat Desa Ciluluk yang hingga saat kini belum menerima kompensasi. Jika pencairan dana dilakukan dalam waktu yang jelas dan adil kepada masyarakat. Ketepatan waktu dalam pencairan dana ini sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian yang selama ini dirasakan masyarakat. Jika proses pencairan dana telah selesai dan berlangsung secara adil maka proses *resettlement* ini bisa dianggap berhasil.

#### 2. Kepuasan Masyarakat Terhadap Harga Tawar Tanah

Keberhasilan juga dapat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat terhadap harga tanah yang diterima. Meskipun masyarakat pasrah menerima harga yang ditawarkan, tetapi tetap perlu dipantau lebih dalam melalui komunikasi yang lebih baik dan transparansi dari pihak pengembang proyek untuk memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak. Untuk saat ini, indikator ini sudah berjalan dengan baik, karena harga tawar tanah sudah disepakati oleh bersama. Dengan begitu, adanya komunikasi dan transparansi yang lebih baik bisa meredakan rasa ketidakadilan yang masyarakat Desa Ciluluk rasakan.

#### 3. Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Mengambil Keputusan

Indikator yang telah berhasil dalam penelitian ini adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti forum-forum diskusi dan mediasi. Masyarakat Desa Ciluluk terlibat secara aktif dalam menyampaikan usulan dan keluhan, serta ada dialog yang konstruktif antara masyarakat, pemerintah dan pihak pengembang proyek, maka proses penyelesaian masalah dianggap berhasil. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam mengambil keputusan akan mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses yang berlangsung.

### **D. Rekomendasi Pengabdian**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi pengabdian yang dapat diajukan untuk memperbaiki situasi ketimpangan distribusi manfaat dalam pembangunan proyek Tol Getaci, diantaranya:

### 1. Pembentukan Tim Mediasi Independen

Pembentukan tim mediasi independen dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak pengembang proyek Tol Getaci. Tim mediasi akan berperan untuk memastikan bahwa suara masyarakat Desa Ciluluk dapat terdengar, dan ketidakadilan distribusi manfaat dapat tersampaikan kepada pihak yang memiliki otoritas. Selain itu, tim ini juga yang akan menjadi fasilitator dialog antara masyarakat, pemerintah dan pengembang proyek untuk menemukan solusi yang lebih adil bagi masyarakat Desa Ciluluk.

### 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Pasca-*Resettlement*

Selain menawarkan solusi jangka pendek, laporan pengabdian ini juga menawarkan solusi jangka panjang, yaitu dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Ciluluk pasca-*resettlement*, karena penting untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang dipindahkan dari tanah mereka. Rekomendasi yang ditawarkan adalah dengan mengadakan program pelatihan keterampilan dan akses ke sumber daya sosial ekonomi yang baru untuk membantu masyarakat bangkit dan mandiri pasca-*resettlement*. Dengan begitu, maka masyarakat tidak hanya dapat kompensasi secara finansial, melainkan mendapat kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi sosial ekonomi yang baru.

Dengan adanya rekomendasi yang ditawarkan ini, diharapkan ketimpangan distribusi manfaat dalam implementasi *resettlement* pembangunan proyek Tol Getaci dapat diminimalisir, dan masyarakat Desa Ciluluk dapat merasakan keadilan distribusi manfaat yang lebih baik dari proyek ini. Sehingga perjalanan untuk memperbaiki fasilitas umum secara skala besar bisa dirasakan dengan adil oleh masyarakat yang terdampak karena *resettlement* dengan masyarakat luar yang nantinya akan menggunakan Tol Getaci.

## **E. PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat dalam pembangunan proyek Tol Getaci yang signifikan dirasakan oleh masyarakat. Ketimpangan distribusi manfaat terlihat bahwa adanya perbedaan harga tanah yang ditawarkan antara Desa Ciluluk dengan Desa Mekarlaksana, dan perbedaan proses pencairan dana kompensasi yang mana Desa Ciluluk belum menerima kompensasi meskipun Desa Mekarlaksana sudah menerima hak mereka. Pada awalnya masyarakat Desa Ciluluk berusaha melakukan perlawanan untuk menegosiasi harga tanah yang ditawarkan karena dianggap tidak adil, hingga akhirnya masyarakat lebih memilih

untuk pasrah karena khawatir perlawanan yang dilakukan hanya akan semakin memperlambat pencairan dana. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kemampuan dan kekuatan masyarakat dalam mengadvokasi pendapat mereka.

Sebagai saran, pengabdian ini merekomendasikan untuk membentuk tim mediasi independen guna memastikan keluhan masyarakat dapat disampaikan dengan baik dan ada komunikasi terbuka antara masyarakat dengan pihak proyek. Selain itu, program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pasca-*resettlement* juga perlu dikembangkan sebagai solusi jangka panjang, agar masyarakat yang terdampak dapat menjadi lebih mandiri setelah pindah dari tanah mereka.

## **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan segala kerendahan hati, tim pengabdian menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut berkontribusi dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat Desa Ciluluk yang telah memberikan waktu, pandangan dan pengalaman berharga selama proses pengumpulan data. Kepada pihak pemerintah Desa Ciluluk dan pengembang proyek Tol Getaci atas kerjasama dan keterbukaan dalam memberikan informasi terkait proyek ini. Serta kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingan selama proses pengabdian berlangsung. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perbaikan kebijakan implementasi *resettlement* di masa yang akan datang, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

unsa.com/assets/file/Dokumen-1704355588.pdf.

Fakhrozi, Ahmad, Agustina Dewi Ningrum S, and Rizki Amanda. 2020. "Kajian Studi Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terhadap Infrastruktur Dan Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 4:14–29. <http://jurnal.ukmpenelitianuny.id/index.php/jippm/article/view/185/77>.

Hayat, Saepul, Sugianto, and Sehab Bunyamin. 2021. "Pemberdayaan Masyarakat Dengan Menerapkan Metode PRA (Participatory Rural Appraisal) Melalui Aspek Teknologi, Sosial Dan Keagamaan." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1 (LXVII): 166–82. [https://eprints.upnyk.ac.id/26169/1/Buku\\_Participatory\\_Rural\\_Appraisal.pdf](https://eprints.upnyk.ac.id/26169/1/Buku_Participatory_Rural_Appraisal.pdf).

Joga, Nirwono, and Dhaneswara Nirwana Indrajoga. 2023. *Strategi Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Di Sekitar Jalan Tol*. Jakarta: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). [https://cms.institute.iigf.co.id/contents/source/files/publikasi/2023/volume\\_01\\_final\\_cetakan-kedua.pdf](https://cms.institute.iigf.co.id/contents/source/files/publikasi/2023/volume_01_final_cetakan-kedua.pdf).

Kotalewala, Fengky, Adonia Ivone Lurette, and Novita Uktolseja. 2020. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum." *Sasi* 26 (3): 415. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397>.

Ohoitimir, Johanis, and Anselmus Jamlean. 2023. "Pembangunan Berkelanjutan Dan Keadilan Sosial: Catatan Tentang Peranan Perguruan Tinggi." *Jurnal Seri Mitra Refleksi Ilmiah-Pastoral* 2 (1): 3–16. <https://www.journal.stfsp.ac.id/index.php/jb/article/view/163>.

Pratiwi, Devi, Nabilaah Althafah, and Siti Khatammi. 2023. *Pro Kontra Isu Pembangunan*. Edited by Kadung Sapto Nugroho. 1st ed. Bandung: CV Agung Ilmu. [https://www.researchgate.net/profile/Kandung-Sapto-Nugroho/publication/371989279\\_PRO\\_KONTRA\\_ISU\\_PEMBANGUNAN\\_Editor\\_Kandung\\_Sapto\\_Nugroho/links/64a23db58de7ed28ba6c3951/PRO-KONTRA-ISU-PEMBANGUNAN-Editor-Kandung-Sapto-Nugroho.pdf#page=76](https://www.researchgate.net/profile/Kandung-Sapto-Nugroho/publication/371989279_PRO_KONTRA_ISU_PEMBANGUNAN_Editor_Kandung_Sapto_Nugroho/links/64a23db58de7ed28ba6c3951/PRO-KONTRA-ISU-PEMBANGUNAN-Editor-Kandung-Sapto-Nugroho.pdf#page=76).

Puspita, Ni Made Dwi, and Ni Putu Cempaka Dharmadewi Atmaja. 2020. "Pengaruh Kompensasi Terhadap Stres Kerja Dan Kepuasan Kerja Karyawan." *Jurnal Bakti Saraswati* 9 (2): 112–19.

Putri, Teran Yohana, and Fitri Liana Dewi. 2023. "Peninjauan Kembali Terkait Efektifitas Relokasi Mangrove Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Demak - Semarang." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5:4231–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11569>.

Ramadhan. 2017. "Kebijakan Publik Dan Sosial Dalam Perspektif Al-Dawudi." UIN Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49501/1/Ramadhan - SPS.pdf>.

Santosa, Wimpy, Danang Parikesit, Yuki M.A Wardhana, Dewanti, Amelia Makmur, Safrilah, and Dwi Ardianta Kurniawan, eds. 2023. *Perspektif Kebijakan Dalam Pembangunan Jalan Tol Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta Selatan: PT Penjaminan

Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Pusat Studi Transportasi Logistik (Pustral) UGM.

[https://cms.institute.iigf.co.id/contents/source/files/publikasi/2023/volume\\_01\\_final\\_cetakan-kedua.pdf](https://cms.institute.iigf.co.id/contents/source/files/publikasi/2023/volume_01_final_cetakan-kedua.pdf).

Seri Hartati, Amir Syamsuadi, and Luluk Elvitaria. 2021. "Keterlibatan Mahasiswa Dan Akademisi Dalam Pengabdian Masyarakat Menghadapi Pandemi Covid-19." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (2): 474–80. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.5307>.

Yuanita, Alifa Cikal. 2022. "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3 (2): 130. <https://doi.org/10.19184/ijl.v3i2.34553>.